

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe penelitian hukum	8
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	8
1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources).....	9

1.5.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	11
1.5.5	Analisis bahan hukum.....	11
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II KARAKTERISTIK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN PADA <i>PEER TO PEER LENDING</i> SAAT PANDEMI COVID-19		14
2.1	Karakteristik Perjanjian dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	14
2.1.1	Perjanjian Pinjam-Meminjam	14
2.1.2	Perjanjian dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	30
2.1.3	Perbandingan Karakteristik Perjanjian Kredit Perbankan dan <i>Peer to Peer Lending</i>	40
2.2	Perbandingan Restrukturisasi Kredit Perbankan dan Restrukturisasi Pinjaman pada <i>Peer to Peer Lending</i>	41
2.2.1	Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan.....	41
2.2.2	Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman pada <i>Peer to Peer Lending</i>	47
2.3	Perbedaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bank dan Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman pada <i>Peer to Peer Lending</i>	55
BAB III UPAYA PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PENERIMA PINJAMAN PADA <i>PEER TO PEER LENDING</i>		58
3.1	Makna Gagal Bayar Penerima Pinjaman Pada <i>Peer to Peer Lending</i>	58
3.2	Upaya yang tepat dalam mengatasi gagal bayar <i>Peer to Peer Lending</i> saat pandemi Covid-19.....	65

3.3	Penyelesaian sengketa dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	72
BAB IV PENUTUP		78
4.1	Kesimpulan	78
4.2	Saran	79
DAFTAR BACAAN		80

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek voor Indonesie / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana
Nasional

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak
Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi
Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

POJK No. 58/POJK.05/2020 tentang perubahan atas POJK No. 14/POJK.05/2020
tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus*
Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank